



PERKUMPULAN KAWAN PESISIR RAJA AMPAT

Alamat: Kampung Friwen | Distrik Waigeo Selatan | Kabupaten Raja Ampat
Provinsi Papua Barat | Kode Pos: 98415

Waisai, 5 Agustus 2026

Nomor : P5-35/PKPRA/Q3/08/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Memberikan Sambutan dan Membuka Kegiatan Workshop

Kepada Yth.

Bpk. ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP, MM, M.Ec.Dev
BUPATI RAJA AMPAT

di –
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Raja Ampat serta memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial yang berkelanjutan, Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat (PKPRA) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan didukung oleh The Asia Foundation (TAF) akan menyelenggarakan Workshop Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Kabupaten Raja Ampat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak Bupati Raja Ampat untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
Jam : 09.00 – 12.00 WIT
Tempat : Ruang Rapat Wayag Kantor Bupati Raja Ampat
Agenda : Terlampir

Workshop ini bertujuan untuk membangun kesepahaman para pemangku kepentingan mengenai peran, fungsi, dan mekanisme kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mendukung percepatan implementasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Raja Ampat. Selain itu, workshop ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi, menyusun mekanisme kerja yang efektif, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna mendukung pengelolaan Perhutanan Sosial yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



PERKUMPULAN KAWAN PESISIR RAJA AMPAT

Alamat: Kampung Pinen | Distrik Maeno Selatan | Kabupaten Raja Ampat
Provinsi Papua Barat | Kode Pos: 98135

Kehadiran serta arahan Bapak Bupati pada kegiatan ini merupakan kehormatan sekaligus menjadi penyemangat bagi seluruh peserta dalam mewujudkan sinergi dan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Raja Ampat.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Besar harapan kami kiranya Bapak Bupati berkenan memenuhi undangan dimaksud. Atas perhatian, kesediaan, dan dukungan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Stevanus Wawiyai

Program Manager Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat

 kawanpesisir4@gmail.com

  (+62) 813 4467 5156

 [skawanpesisir](#)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN WORKSHOP PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL KABUPATEN RAJA AMPAT

Waisai, 11 Agustus 2026

A. LATAR BELAKANG

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah guna dikelola dan memperoleh manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Dalam rangka percepatan distribusi akses legal pengelolaan perhutanan sosial, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang menargetkan pada tahun 2030 telah terdistribusi akses legal seluas 7.380.000 hektare. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan strategi percepatan distribusi akses legal, yaitu: menentukan skala prioritas pemberian akses legal perhutanan sosial; penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan; dan penguatan mekanisme serta percepatan pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Provinsi Papua Barat Daya memiliki luas kawasan hutan sekitar 3.476.891 hektare, yang terdiri atas hutan konservasi (1.217.470 ha), hutan lindung (772.328 ha), hutan produksi tetap (599.522 ha), hutan produksi terbatas (306.082 ha), dan hutan produksi konversi (733.898 ha). Dari luas tersebut, areal perhutanan sosial yang telah dialokasikan Kementerian Kehutanan dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS Revisi IX) di Provinsi Papua Barat Daya seluas 405.659,16 hektare. Realisasi perhutanan sosial di Kabupaten Raja Ampat hingga Juni 2026 seluas ±66.702 hektare dengan jumlah Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial yang diterbitkan sebanyak 30 unit untuk skema Hutan Desa. Dari 30 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang telah mendapatkan akses pengelolaan hutan, belum seluruhnya memiliki dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sesuai potensi yang ada pada areal kelola.



PERKUMPULAN KAWAN PESISIR RAJA AMPAT

Alamat: Kampung Friem | Distrik Wages Selatan | Kabupaten Raja Ampat
Provinsi Papua Barat | Kode Pos: 99415

Belum optimalnya pemanfaatan PIAPS untuk akses legal bagi masyarakat dan kelompok perempuan serta penguatan kelembagaan KPS di Kabupaten Raja Ampat perlu didukung dengan upaya strategis guna percepatan pengelolaan perhutanan sosial menuju pengelolaan sumber daya alam secara mandiri oleh masyarakat. Diperlukan kolaborasi yang melibatkan berbagai sektor, seperti pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan. Perpres Nomor 28 Tahun 2023 mengamanatkan percepatan dan perluasan capaian melalui beberapa terobosan, antara lain ditetapkannya Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPS) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi secara kolaboratif.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan Rapat Evaluasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) pada tanggal 30–31 Maret 2025 di Sorong guna mengaktivasi kembali Pokja Perhutanan Sosial setelah masa tugas Pokja berakhir pada 2025. Langkah ini diambil untuk memperkuat pelaksanaan program sekaligus sebagai upaya strategis menghidupkan kembali peran pendampingan dan fasilitasi di lapangan. Pokja diharapkan mampu mengakselerasi sosialisasi program hingga tingkat kampung, mempermudah proses, serta mendampingi kelompok perhutanan sosial dalam penyusunan dokumen penting seperti RKPS, KUPS, dan RKT.

Dalam rangka mempercepat pencapaian target perhutanan sosial dan memastikan pengelolaan akses kelola masyarakat berjalan efektif, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) di tingkat kabupaten. Pokja ini menjadi platform koordinasi multipihak yang bertugas mengintegrasikan perencanaan, pendampingan, pengembangan usaha, akses pembiayaan, penguatan pasar, serta dukungan kebijakan bagi kelompok perhutanan sosial.

Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat melalui Kemitraan The Asia Foundation (TAF) telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan Perkumpulan Kawan Pesisir tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Nomor 100.3.7.1/187/SETDA dan Nomor P4-010.1/PKPRA/Q3/VII/2025 tanggal 11 Juni 2025. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Raja Ampat bersama Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat (PKPRA) dan Balai Perhutanan Sosial Ambon, dengan dukungan The Asia Foundation (TAF), akan menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Kabupaten Raja Ampat sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi program, dan pengembangan strategi percepatan implementasi perhutanan sosial di daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

 kawanpesisir4@gmail.com

 (+62) 883 4467 5156

 @kawanpesisir



PERKLUMPULAN KAWAN PESISIR RAJA AMPAT

Alamat : Kampung Priwan | Distrik Wanges Selatan | Kabupaten Raja Ampat
Provinsi Papua Barat | Kode Pos : 88415

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial,
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi,
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

C. TUJUAN

Workshop ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi antara Balai Perhutanan Sosial Ambon, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, instansi teknis terkait, masyarakat, lembaga pendamping, akademisi, dan mitra pembangunan dalam percepatan implementasi Perhutanan Sosial.
2. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PPS Kabupaten Raja Ampat sebagai wadah koordinasi, serta menyepakati struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas.
3. Memperoleh dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, mensinkronkan program Perhutanan Sosial dengan RPJMD, RKPD, dan RTRW, serta mendapatkan komitmen dan dukungan dari pemda dan para pihak.
4. Mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan, tantangan utama (konflik tenurial, keterbatasan pendampingan, lemahnya kelembagaan, minim akses modal dan pasar), serta peluang penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Raja Ampat.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Workshop ini adalah:

1. Terwujudnya sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, Balai Perhutanan Sosial Maluku Papua, OPD teknis, lembaga adat, LSM, perguruan tinggi, swasta, dan mitra pembangunan, yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan bersama.
2. Tersusunnya struktur organisasi dan mekanisme kerja Pokja, serta terintegrasinya program Perhutanan Sosial ke dalam RPJMD, RKPD, dan RTRW yang didukung dengan kebijakan penganggaran daerah dan stakeholders lainnya.
3. Adanya dukungan para pihak untuk percepatan pengakuan akses kelola hutan bagi masyarakat adat, kelompok Perhutanan Sosial, dan KUPS, sehingga mampu mengelola hutan secara mandiri, lestari, dan sesuai peraturan perundang-undangan.



PERKLUMPULAN KAWAN PESISIR RAJA AMPAT

Alamat: Kampung Priwan | Distrik Maigen Selatan | Kabupaten Raja Ampat
Provinsi Papua Barat | Kode Pos: 96175

4. Tersusunnya rekomendasi langkah-langkah percepatan dan penyelesaian terhadap berbagai hambatan, seperti konflik tenurial, keterbatasan pendampingan, lemahnya kelembagaan, serta minimnya akses modal dan pasar bagi kelompok pengelola hutan.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Workshop Pembentukan Pokja PPS dilaksanakan di Waissai pada:

- Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
- Jam : 09.00 – 16.00 WIT
- Tempat : Ruang Rapat Wayag Kantor Bupati Raja Ampat

F. PESERTA

Peserta Workshop Pembentukan Pokja PPS Kabupaten Raja Ampat

No	Daftar Undangan	Jumlah
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat		
1	Bupati Raja Ampat	1 orang
2	Wakil Bupati Raja Ampat	1 orang
3	Sekretaris Daerah	1 orang
4	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1 orang
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	1 orang
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1 orang
7	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 orang
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1 orang
9	Kepala Dinas Pariwisata	1 orang
10	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	1 orang
11	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	1 orang
12	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 orang
13	Kepala Dinas PUPR	1 orang
14	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1 orang
15	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	1 orang
16	Kepala Bidang Pemerintahan DPMK	1 orang
17	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA BP4D	1 orang
18	Kepala Bidang Sosial Budaya BP4D	1 orang



PERKUMPULAN KAWAN PESISIR RAJA AMPAT

Alamat: Kampung Friwen | Distrik Waigeo Selatan | Kabupaten Raja Ampat
Provinsi Papua Barat | Kode Pos: 98415

No	Daftar Undangan	Jumlah
19	Ketua TP PKK Kabupaten Raja Ampat	1 orang
20	Kepala Distrik Waigeo Selatan	1 orang
21	Kepala Distrik Batanta Utara	1 orang
22	Kepala Distrik Batanta Selatan	1 orang
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya		
23	Kepala Dinas Kehutanan	1 orang
24	Kepala Bapperda	1 orang
25	Plt. Kepala KPH Unit I Raja Ampat	1 orang
UPT Kemetenteran		
26	Kepala Balai Perhutanan Sosial Ambon	1 orang
27	Seksi Wilayah III Sorong Balai Perhutanan Sosial Ambon	2 orang
28	Balai Konservasi Sumberdaya Alam	1 orang
Kelompok Perhutanan Sosial		
20	LPHK Friwen	1 orang
30	LPHK Saprokren	1 orang
31	LPHK Yensawai Timur	1 orang
32	LPHK Yensawai Barat	1 orang
33	LPHK Arefi Selatan	1 orang
Pemerintah Kampung		
34	Kepala Kampung Friwen	1 orang
35	Kepala Kampung Saprokren	1 orang
36	Kepala Kampung Yensawai Timur	1 orang
37	Kepala Kampung Yensawai Barat	1 orang
38	Kepala Kampung Arefi Selatan	1 orang
Mitra Pembangunan		
30	The Asia Foundation	2 orang
40	Perkumpulan Kawan Pesisir	3 orang
41	GIZ FORCLIME	1 orang
42	Econusa	1 orang
43	FFI	1 orang

PERKUMPULAN KAWAN PESISIR RAJA AMPAT

Alamat: Kampung Friwen | Distrik Maipon Selatan | Kabupaten Raja Ampat
Provinsi Papua Barat | Kode Pos: 99415

No	Daftar Undangan	Jumlah
Swasta		
44	Asosiasi Homestay Raja Ampat	1 orang
45	Asosiasi Travel Agent Raja Ampat	1 orang
46	PT. GAG Nikel	1 orang
47	PLN Raja Ampat	1 orang
Total		50 Orang

G. JADWAL KEGIATAN

Waktu	Kegiatan	PIC
08.30 – 09.00	Registrasi peserta	Panitia
09.00 – 10.00	• Prolog oleh MC • Menyanyikan lagu Indonesia Raya • Menyanyikan lagu Tanah Papua • Pembacaan Doa • Sambutan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan • Sambutan dan arahan Bupati Raja Ampat sekaligus membuka acara • Foto bersama	Protokoler Pemda Raja Ampat
10.00 – 10.15	Coffee Break	Panitia
10.15 – 12.00	Panel 1 • Direktur PKPS Kementerian Kehutanan "Kebijakan penyiapan kawasan Perhutanan Sosial di Prov. Papua Barat Daya dan di Kabupaten Raja Ampat" • Kepala Bappeda Kabupaten Maros Praktik Baik dari Maros: Peran Pokja dalam Percepatan Perhutanan Sosial • The Asia Foundation: "Pembelajaran mendorong Pokja PPS dan Persetujuan PS di Indonesia" Diskusi – Tanya Jawab	Moderator : Bappeda Raja Ampat
12.00 – 13.00	Istirahat – Makan Siang	Panitia



PERKLIMPLILAN KAWAN PESISIR RAJA AMPAT

Alamat: Kampung Friwan | Distrik Waigro Selatan | Kabupaten Raja Ampat
Provinsi Papua Barat | Kode Pos: 98475

Waktu	Kegiatan	PIC
13.00 – 15.30	Panel 2: • Kepala Balai Perhutanan Sosial Ambon: Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Raja Ampat • Kepala Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial Ambon: Pengantar peran, fungsi, dan tugas Pokja Percepatan Perhutanan Sosial • PKPRA : Draft usulan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja pokja PPS Diskusi dan tanya jawab	Moderator : Bappeda Raja Ampat
15.30 – 16.00	Penutupan	Kepala Bappeda Kab. Raja Ampat